

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariel S. Sumenge. 2013. “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan”. *Jurnal EMBA*, Vol. 2 No. 3. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Bisma, I Dewa Gde., Susanto, Hery. 2010. “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007”. *Jurnal GeneÇ Swara*, Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Fahrianta, Riswan., Carolina, Viani. 2012. “Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas”. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol.13 No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Hairunissa, Nanis. 2008. “Penilaian Kinerja Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Terhadap APBD”. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2 No. 2.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juanda, B. 2007. “Pemekaran Daerah Serta Implikasinya Terhadap APBN”. *Jurnal Ekonomi*, Volume XXV, Edisi Oktober 2007: 157-171.
- Kurrohman, Taufik. 2012. “Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja Keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa timur”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, vol. 5, No. 1, Maret 2013, pp. 1-11.

Mahmudi, 2007. *“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik”*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun, mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba. Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran.

Rivai, Veithzal, Dkk. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Susanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia.

Tim Penyusun FE Universitas Sriwijaya, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Indralaya: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya